



BRMP
PENERAPAN

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN 2 TAHUN 2025

**Balai Besar Pengembangan dan Penerapan
Modernisasi Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan masyarakat di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Triwulan II Tahun 2025.

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sebagai salah satu unit pelayanan publik atau *public service* dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mewujudkan fungsinya sebagai aparatur negara pengabdikan masyarakat. Oleh karenanya, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dengan dasar tersebut, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian selaku penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara rutin. Melalui hasil survei, diharapkan kualitas pelayanan publik di BBPPMP dapat dilihat dan diukur, sehingga kedepannya dapat ditingkatkan guna mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu. Demikian pula kami mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dalam pelayanan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bogor, Juni 2025

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

NIP. 19670514 199703 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan, Sasaran, Manfaat, dan Ruang Lingkup	2
II. PENGERTIAN UMUM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.....	1
2.1. Definisi Umum	1
2.2. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat	2
III. METODE DAN TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	3
3.1. Metode Survei	3
3.2. Tahapan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3
IV. PELAPORAN DAN EVALUASI.....	8
4.1. Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).....	8
4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
4.3. Tren Nilai IKM periode Januari 2024 – Juli 2025	13
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	14
5.1. Kesimpulan	14
5.2. Rekomendasi	14

I. PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) merupakan bentuk cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi seluruh badan publik. Kewajiban badan publik adalah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Komisi informasi pusat selain menjadi lembaga yang ditunjuk oleh UU KIP untuk mengawal keterbukaan informasi publik, juga memiliki peran sebagai badan publik yang hak dan kewajibannya sama dengan badan publik lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) memiliki tugas pokok pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008, yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian. Beberapa poin yang dituang dalam Permentan No. 32 Tahun 2011 menjelaskan tentang dasar pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian hadir mewujudkan tujuan dari Permentan tersebut, untuk membentuk komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon atau pengguna informasi pertanian dan kedua menciptakan integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik. “Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik”.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian selaku penyelenggara pelayanan publik. Dengan melihat sejauh mana pelayanan publik mampu memuaskan kebutuhan pengguna yang diukur melalui pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM. SKM merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Nilai SKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif secara langsung atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sebagai bentuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Survei yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.3. Tujuan, Sasaran, Manfaat, dan Ruang Lingkup

A. Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Manfaat

1. Tersedianya informasi tentang kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
2. Tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) secara periodik,

3. Tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan,
4. Tersedianya informasi tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian, dan
5. Memacu persaingan positif antar Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi:

- 1) Metode dan Langkah-Langkah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, dan
- 2) Pelaporan dan Evaluasi.

II. PENGERTIAN UMUM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2.1. Definisi Umum

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala per riwulan, atau semester, atau minimal satu tahun sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di Universitas atau perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN yang memberikan pelayanan publik.

2.2. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017, unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan serta tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

III. METODE DAN TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

3.1. Metode Survei

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei digunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

3.2. Tahapan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

A. Penetapan Pelaksana

Apabila dilaksanakan secara swakelola diperlukan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang terdiri dari:

- 1) Pengarah,
- 2) Pelaksana yang terdiri atas: Ketua dan Anggota sekaligus sebagai surveyor sebanyak banyaknya 5 orang, dan
- 3) Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga yang sudah berpengalaman, perlu melalui “perjanjian kerja sama” dengan pihak ketiga.

B. Penyiapan bahan

1) Kuesioner

Kuesioner digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner sebagaimana format terlampir (Lampiran 1).

2) Bagian Kuesioner

Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Bagian Pertama: Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP).

Bagian Kedua: Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian Ketiga: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

3) Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat mutu pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

4) Penetapan Responden dan Lokasi Pengumpulan Data

a. Penetapan Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP). Untuk memenuhi akurasi hasil pengukuran indeks, responden terpilih ditetapkan paling kurang 75% dari jumlah populasi penerima layanan.

b. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data dilakukan di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan dilakukan secara *online* maupun secara *offline*. Secara umum, kegiatan diupayakan untuk secara maksimal menggunakan media online terlebih dahulu.

5) Jadwal Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- a. Pengukuran IKM diperkirakan memerlukan waktu selama satu bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Persiapan, enam hari kerja;
- Pelaksanaan pengumpulan data, enam hari kerja;
- Pengolahan data indeks, enam hari kerja; dan
- Pengukuran dan pelaporan hasil, enam hari kerja.

b. Pelaksanaan Pengukuran IKM

- Pengumpulan data, Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Sembilan unsur pelayanan tersebut terdiri dari unsur persyarat pelayanan, prosedur layanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran/masukan, dan sarana prasarana.
- Pengisian kuesioner
- Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut:

- 1) Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- 2) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:
 - a. Unit pelayanan sendiri Dengan cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi subyektifitas hasil pengukuran indek, dapat melibatkan Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal, unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.
 - b. Pihak ketiga yang sudah berpengalaman Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif. Pihak ketiga dapat terdiri atas unsur instansi terkait antara lain Badan Pusat Statistik atau Perguruan Tinggi (pakar) atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha atau kombinasi di antara unit tersebut.

C. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Nilai SKM kemudian dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100. Kategori nilai persepsi, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan (Permenpan No. 14 Tahun 2017)

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

IV. PELAPORAN DAN EVALUASI

4.1. Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

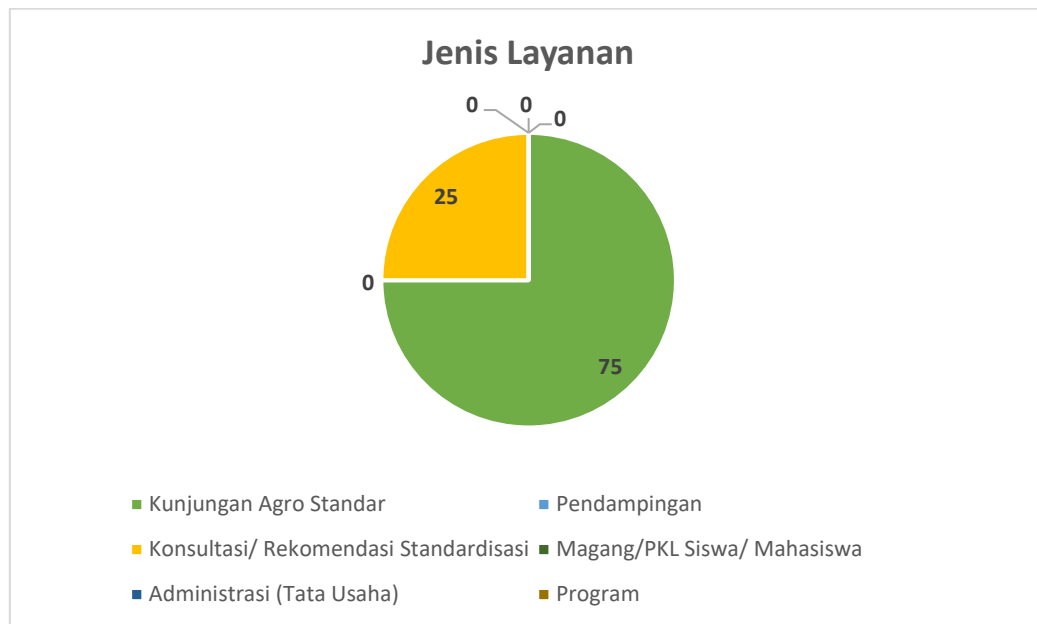
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Triwulan II Tahun 2024 dimulai dari bulan April hingga Juni 2025. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh mencapai 44 responden.

Tabel 2. menunjukkan bahwa penerima layanan terdiri dari responden laki-laki dengan presentase 50% atau berjumlah 22 orang dan perempuan 50% atau 22 orang. Penerima layanan publik di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian didominasi oleh pengunjung dengan rentang usia 20-29 tahun, sedangkan paling sedikit berada pada usia lebih dari 50 tahun. Sedangkan berdasarkan pekerjaannya, penerima pelayanan publik di BBPPMP merupakan guru dan siswa.

Tabel 2. Sebaran Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	22	50
		Perempuan	22	50
2.	Usia	Di bawah 20 Tahun	17	38,64
		20 s.d. 29 Tahun	19	43,18
		30 s.d. 39 Tahun	5	11,36
		40 s.d. 49 Tahun	3	4,55
		Di atas 50 Tahun	1	2,57
3.	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	0	0
		Pegawai Swasta	0	0
		Wirausaha/Usahawan	0	0
		Siswa	17	38,64
		Mahasiswa	9	20,45
		Guru	17	38,64
		Lainnya	1	2,27
4.	Pendidikan	SD ke Bawah	0	0

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		SMP	6	13,64
		SMA	13	29,55
		D1, D2, D3	0	0
		S1	24	54,55
		S2 dan S3	1	2,27



Gambar 1. Presentase Minat Layanan Publik Di BBPPMP

Gambar 1. menjelaskan bahwa pelayanan pada triwulan II merupakan layanan kunjungan Agro Standar. Pada bulan April hingga Juni 2025 BBPPMP melayani tiga sekolah yang berkunjung ke taman Agro Standar. Penerima layanan antara lain adalah TK IT Alam S'Mesta, SD IT Sholahuddin, Pondok Pesantren Darul Muttaqien. Sedangkan layanan pendampingan dilakukan ke dua instansi, yaitu Universitas Ibnu Khaldun mengenai pendampingan pembuatan kompos dan TK Miftahul Jannah mengenai budidaya tanaman mangga.

4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai

indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1111.

Tabel 3. Nilai IKM per Unsur Periode April – Juni 2025

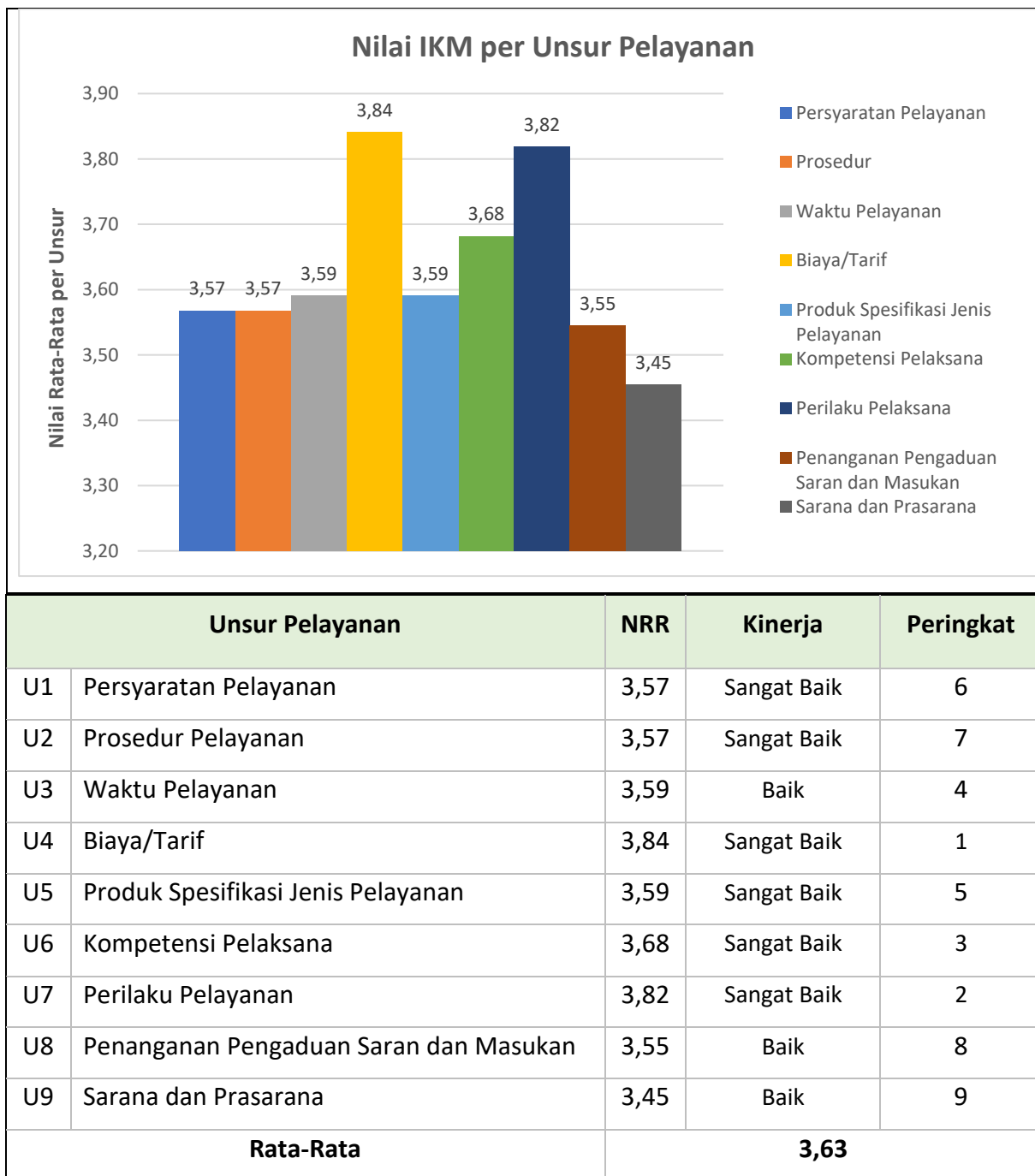
RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,57	3,57	3,59	3,84	3,59	3,68	3,82	3,55	3,45
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,40	0,40	0,40	0,43	0,40	0,41	0,42	0,39	0,38
Nilai IKM Unit Pelayanan	90,71								

Tabel 4. Kategori Nilai IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3. menunjukkan bahwa hasil pengolahan data SKM periode April - Juni 2025 diperoleh nilai rata-rata per unsur dari rentang 3,45 – 3,82. Nilai tersebut memberikan nilai IKM unit layanan sebesar 90,71, dan masuk dalam kategori “A” atau “Sangat Baik” (Tabel 4).

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 terdiri atas sembilan unsur, yaitu persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Hasil pengukuran SKM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Nilai IKM Per Unsur Layanan Periode April - Juni 2025

Gambar 2 menjelaskan nilai dari unsur-unsur pelayanan berada pada rentang nilai 3,45 hingga 3,82. Beberapa nilai unsur masuk dalam kategori kinerja Sangat Baik. Hal tersebut perlu dipertahankan dan masih harus ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang memiliki nilai cukup tinggi harus dipertahankan.

Berdasarkan Sembilan unsur pelayanan, terdapat dua unsur pelayanan tertinggi, yaitu unsur Biaya/Tarif dan unsur perilaku pelayanan. Pengguna pelayanan telah memahami bahwa pelayanan yang tersedia di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk beberapa pelayanan seperti Taman Agro Standar memberikan souvenir gratis untuk pengguna layanan, seperti hasil panen atau benih tanaman. Sehingga layanan ini menjadi jenis layanan favorit bagi pengguna, terutama untuk yang ingin mengenal lebih luar mengenai budidaya tanaman pertanian. Sedangkan unsur perilaku pelayanan dinilai cukup kompeten dalam memberikan pelayanan, ramah dan cepat.

Dalam proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas terdapat dua unsur pelayanan yang harus ditingkatkan kembali. Dua unsur tersebut antara lain, adalah:

- a. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan (3,55), dan
- b. Saranan dan Prasarana (3,45)

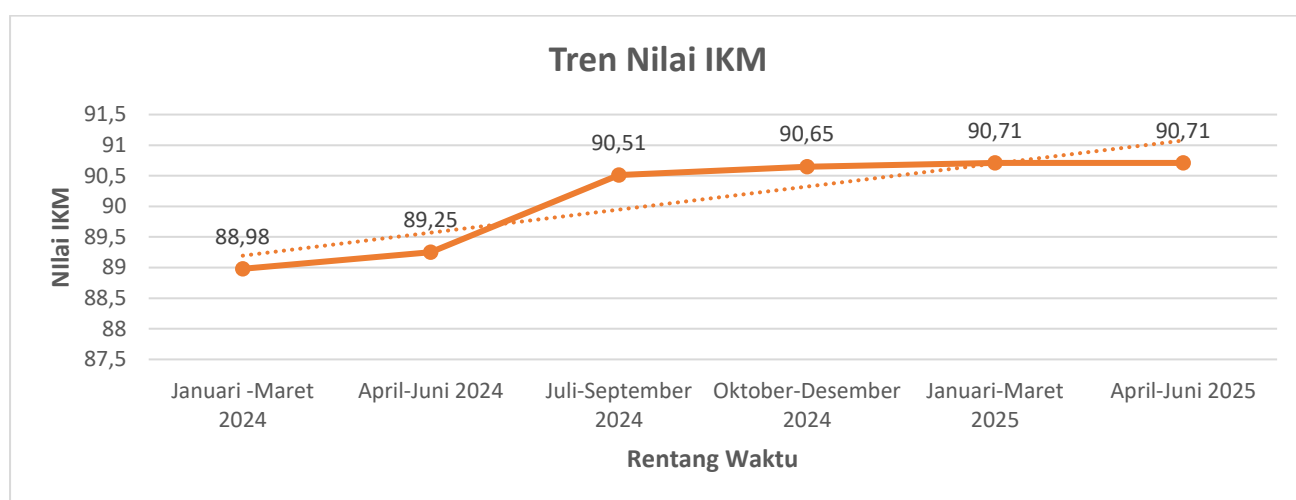
Salah satu penyebab penilaian pada unsur sarana prasarana kurang optimal dan perlu ditingkatkan antara lain adalah banyaknya pengunjung yang datang ke Taman Agro Standar di waktu yang sama. Beberapa fasilitas yang dikeluhkan antara lain kurang luasnya ruang pertemuan, kelengkapan toilet seperti tidak adanya sabun, hingga kurangnya tempat pembuangan sampah.

Unsur penanganan pengaduan saran dan masukan juga dinilai perlu ditingkatkan. Pengguna layanan kesulitan dalam menyampaikan saran dan masukan. Tidak adanya tempat pengaduan saran dan masukan hingga sulitnya mencari informasi terkait pengaduan juga menyebabkan nilai diunsur ini kecil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa alternatif upaya perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan di Taman Agro Standar. Pertama, perlu dilakukan penataan ulang jadwal kunjungan secara lebih sistematis melalui sistem reservasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan pengunjung dan memastikan bahwa kapasitas ruang serta fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterbukaan informasi mengenai jadwal kunjungan baiknya disampaikan melalui media sosial BBPPMP atau website. Kemudian perlu diadakannya fasilitas-fasilitas pengaduan, baik berupa kotak pengaduan maupun link pengaduan yang ditampilkan melalui *barcode*.

4.3. Tren Nilai IKM periode Januari 2024 – Juni 2025

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil Analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Tren Nilai IKM Periode Januari 2024 – Juni 2025

Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil olah data survei kepuasan Masyarakat, kinerja penyelenggaraan pelayanan di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian pada periode Januari – Juni 2025 terus mengalami peningkatan.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian untuk Triwulan II Tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik, yang dimulai dari kegiatan pengelolaan, pelayanan hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia telah dilaksanakan. Secara umum kualitas pelayanan dipersepsikan “Sangat Baik” oleh Masyarakat penggunaanya. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM yang diperoleh yaitu 90,71.

Berdasarkan Sembilan unsur pelayanan, terdapat dua unsur pelayanan tertinggi, yaitu unsur Biaya/Tarif dan unsur perilaku pelayanan. Pengguna pelayanan telah memahami bahwa pelayanan yang tersedia di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk beberapa pelayanan seperti Taman Agro Standar memberikan souvenir gratis untuk pengguna layanan, seperti hasil panen atau benih tanaman. Sehingga layanan ini menjadi jenis layanan favorit bagi pengguna, terutama untuk yang ingin mengenal lebih luar mengenai budidaya tanaman pertanian. Sedangkan unsur perilaku pelayanan dinilai cukup kompeten dalam memberikan pelayanan, ramah dan cepat.

Unsur sarana prasarana dan waktu pelayanan dinilai kurang optimal dan perlu ditingkatkan kembali. Salah satu penyebabnya antara lain adalah banyaknya pengunjung yang datang ke Taman Agro Standar di waktu yang sama. Beberapa fasilitas yang dikeluhkan antara lain kurang luasnya ruang pertemuan, kelengkapan toilet seperti tidak adanya sabun, hingga kurangnya tempat pembuangan sampah. Sedangkan pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan juga perlu ditingkatkan. Pengguna layanan kesulitan untuk menyampaikan saran dan masukan, seperti tidak adanya kotak pengaduan atau informasi yang jelas mengenai pengaduan tersebut.

5.2. Rekomendasi

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama peningkatan kecepatan pelayanan, peningkatan

kedisiplinan petugas pelayanan, peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan proses dalam pemberian pelayanan, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

- b. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan dan keterbukaan informasi bagi pengguna layanan. Seperti jadwal layanan kunjungan taman Agro Standar, prosedur layanan, jadwal panen, sarana pengaduan dan sebagainya
- c. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pengguna layanan dalam mengajukan pelayanan salah satunya dengan menyediakan akses atau formulir pelayanan secara online.
- d. Memperhatikan kebersihan fasilitas umum seperti toilet dan kelengkapan cuci tangan.
- e. Menyediakan kotak pengaduan saran dan masukan, atau berupa link/barcode yang disediakan ditempat rampai pengunjung.
- f. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodic (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Kuesioner Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

UNIT LAYANAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBPPMP)

Tanggal Survei :

PROFIL

Nama :
 No. Hp :
 Jenis Kelamin : ☐ P ☐ L
 Usia : ☐ <20 ☐ 20-29 ☐ 30-39 ☐ 40-49 ☐ >50
 Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ D4 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
 Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUUSAHA ☐ GURU ☐ SISWA
☐ MAHASISWA ☐ LAINNYA
 Jenis Layanan : ☐ Kunjungan Agroeduwisata ☐ Konsultasi/Rekomendasi ☐ Program
☐ Administrasi (Tata Usaha) ☐ Magang/PKL Siswa/Mahasiswa ☐ Perpustakaan
☐ Pendampingan/Pelatihan ☐ Lainnya

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak Sesuai. b. Kurang Sesuai. c. Sesuai. d. Sangat Sesuai.	P*) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak Mudah. b. Kurang Mudah. c. Mudah. d. Sangat Mudah.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak Sopan dan Tidak Ramah. b. Kurang Sopan dan Kurang Ramah. c. Sopan dan Ramah. d. Sangat Sopan dan Sangat Ramah.	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan unit ini. a. Tidak Cepat. b. Kurang Cepat. c. Cepat. d. Sangat Cepat.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan maklumat pelayanan/janji layanan yang telah dijanjikan oleh penyelenggara pelayanan. a. Buruk. b. Cukup. c. Baik. d. Sangat Baik.	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. a. Sangat Mahal. b. Cukup Mahal. c. Murah. d. Gratis.	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat saudara tentang tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan ini. a. Tidak Sesuai. b. Cukup Sesuai. c. Sesuai. d. Sangat Sesuai.	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak Sesuai. b. Kurang Sesuai. c. Sesuai. d. Sangat Sesuai.	1 2 3 4	Jika ada saran perbaikan layanan lainnya, mohon disebutkan :	

Lampiran 2. Hasil Olah Data SKM

RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	4	4	4	3
2	3	4	4	4	4	3	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	3	3	4	4	3
5	3	3	4	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	4	3	3	4	3	3
7	3	3	3	4	4	3	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	3	4	3	3	3	3	3
10	3	3	3	4	3	4	4	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	4	4	4	4	4	4	3
15	4	4	4	3	4	4	4	4	4
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	3	3	3	3	4	3	3	3
19	3	3	3	4	3	3	4	3	3
20	4	4	4	3	3	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	4	4	3	3
22	3	3	3	4	3	4	4	3	3
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3
24	3	3	4	4	3	3	4	3	2
25	4	4	3	4	4	4	4	4	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	3	4	3	3
28	4	3	3	4	3	4	4	4	3

RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4
33	4	4	4	4	4	4	4	3	3
34	4	3	3	4	4	4	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	3	3	3	3
37	4	4	3	4	4	4	4	3	3
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	4	3	3	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	3	4
44	3	4	4	4	3	4	4	4	3
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,57	3,57	3,59	3,84	3,59	3,68	3,82	3,55	3,45
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,40	0,40	0,40	0,43	0,40	0,41	0,42	0,39	0,38
Nilai IKM Unit Pelayanan	90,71 (A atau Sangat Baik)								

Keterangan:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik